

BAB I

PENDAHULUAN

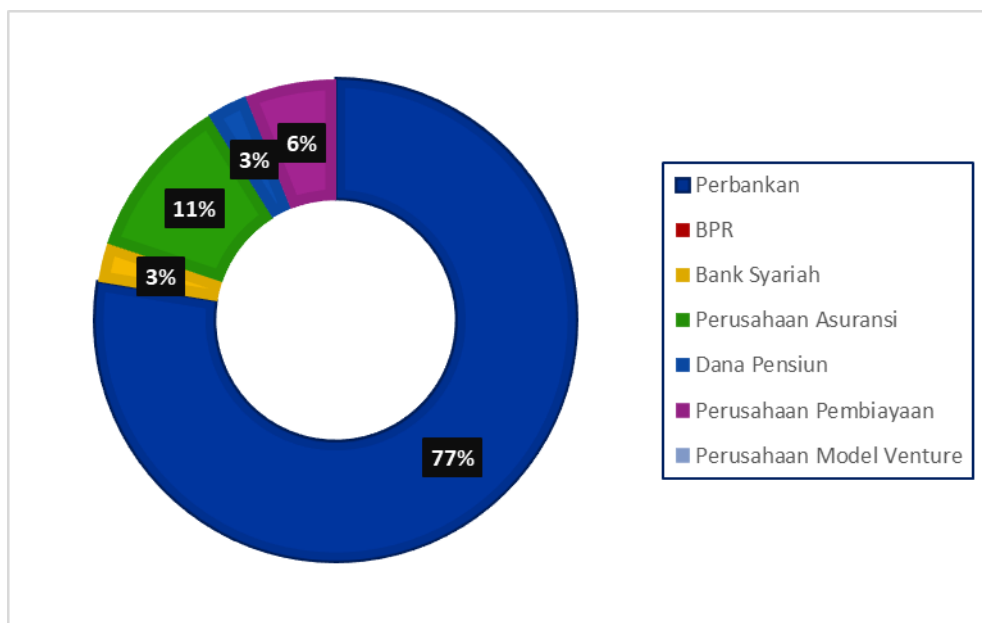
A. Latar Belakang Penelitian

Kondisi perekonomian di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa sektor. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh pada stabilitas perekonomian suatu negara. Instabilitas sektor keuangan pernah merusak ekonomi Indonesia di waktu krisis pada tahun 1998. Untuk memulihkan keadaan dari keterpurukan di waktu krisis pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dampak buruknya tidak hanya menimpa perekonomian nasional tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan politik Indonesia. Pelajaran dari krisis tersebut telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya stabilitas pasar keuangan dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan yang membentuk sistem keuangan.

Sistem keuangan merupakan suatu sistem yang memfasilitasi simpan pinjam dana atau uang. Dalam perekonomian suatu negara, sistem keuangan memiliki peran penting dan strategi. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Apabila sistem keuangan tidak berfungsi dengan baik dan stabil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sukrudin (2014), mengatakan bahwa dengan adanya sistem keuangan yang stabil mampu mendorong kinerja sektor riil melalui peran intermediasi lembaga keuangan

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu pemerintah dalam upaya pengendalian tingkat inflasi.

Institusi keuangan memiliki peran cukup dominan dalam mempengaruhi sistem keuangan di Indonesia. Institusi keuangan memiliki kewajiban melayani masyarakat yang ingin menggunakan jasa-jasa keuangan. Aset institusi keuangan di Indonesia pada saat ini di dominasi oleh perbankan 77%. Komposisi aset lembaga keuangan di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Kajian Stabilitas Sistem Keuangan No. 27, September 2016, Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 1.1.

Pangsa Aset Lembaga Keuangan di Indonesia

Pada gambar 1.1 diatas mencerminkan komposisi lembaga keuangan di Indonesia yang paling dominan adalah institusi perbankan dengan komposisi sebesar 77%. Hal tersebut dikarenakan adanya volume usaha,

mobilisasi dana dari masyarakat dan adanya pemberian kredit sehingga membuat industri keuangan perbankan menjadi lebih dominan dari pada lembaga keuangan yang lainnya. Apabila terjadi krisis pada institusi perbankan maka akan berdampak besar terhadap krisis sistem keuangan. Stabilitas sektor perbankan menjadi bagian dari stabilitas pada institusi keuangan yang memiliki kaitan erat dengan kestabilan dan kesehatan perekonomian suatu negara (Andrew Crocket dalam Gunadi, 2013). Hal tersebut dibuktikan dengan fungsi perbankan sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan. Apabila fungsi intermediasi tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak buruk pada alokasi dana yang dapat mengakibatkan krisis pada sistem ekonomi.

Krisis 1997/1998 dapat memberi gambaran bagaimana kondisi krisis ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan yang diiringi *collape*-nya puluhan bank di Indonesia (Firdaus dalam Salam 2016). Pada saat itu terjadi pengambilan uang (*rush*) yang dilakukan secara besar-besaran oleh nasabah sehingga berakibat pada tutupnya 16 bank di Indonesia karena masalah likuiditas (Maliha, 2011). Kondisi ketahanan perbankan saat itu sangat rentan terhadap krisis, hal itu akibat dari masih lemahnya kondisi internal dari bank. Untuk dapat menstabilkan dan menyelamatkan kembali sektor perbankan, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 600 triliun atau setara dengan 60% dari Produk Domestik Bruto (Riyanto et al dalam Salam, 2016).

Tabel 1.1
Beberapa Indikator Perbankan Pada Awal Krisis Ekonomi
(Miliar Rupiah)

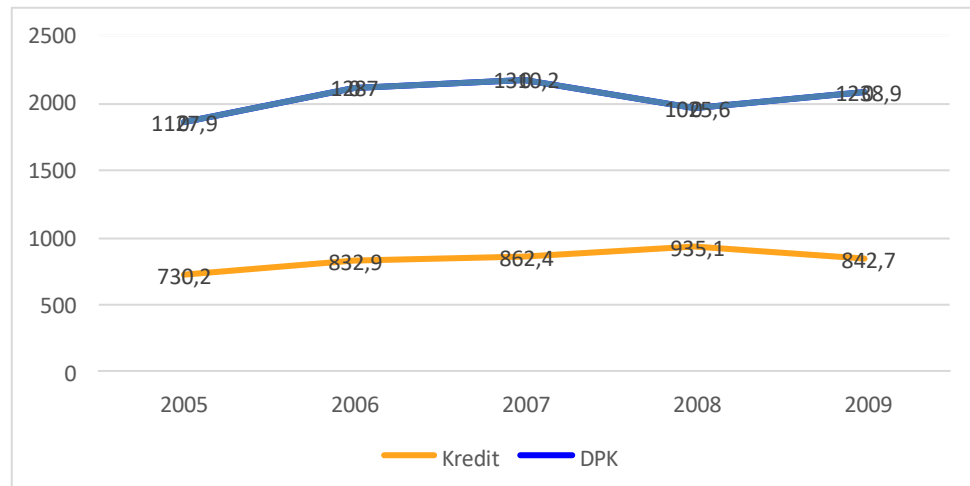
Indikator	1995	1996	1997
Dana Pihak Ketiga	214.764	281.718	357.613
Kredit	234.611	292.921	378.134
Kredit Non Lancar	24.400	27.957	38.802
Biaya Operasional terhadap Pembiayaan Operasional (BOPO)	0.92	0.92	1.01

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 1997/1998

Tabel 1.1 mencerminkan dana pihak ketiga dan biaya operasional. Kondisi perbankan Indonesia di tahun 1997 secara umum berkembang cukup pesat. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang pesat sebesar 26,94 persen. Di sisi lain masalah mulai muncul pada perbankan nasional ketika sektor perbankan meningkat pesat, yaitu peningkatan kredit non lancar dari Rp 27.597 Milyar pada tahun 1996 menjadi Rp 30.802 Milyar. Tidak hanya itu permasalahan juga muncul dari efisiensi usaha sektor perbankan yang memburuk. Hal ini ditunjukkan melalui meningkatnya BOPO yang semakin meningkat pada tahun 1998. Sehingga biaya operasional yang harus dikeluarkan bank lebih besar dari pada pendapatan operasional (Oktavilia, 2008).

Krisis yang melanda pada 2008 terjadi disaat kondisi ekonomi Indonesia belum stabil pasca krisis 1997/1998. Dimana krisis tersebut muncul akibat adanya kredit perumahan yang macet (*sub prime mortgage*) di Amerika Serikat. Sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap

bank menurun. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya likuiditas yang berdampak pada bank-bank yang mengalami kesulitan dalam mencari pasokan dana. Dari kondisi tersebut mendorong bank untuk meminta tambahan likuiditas pada pemerintah.



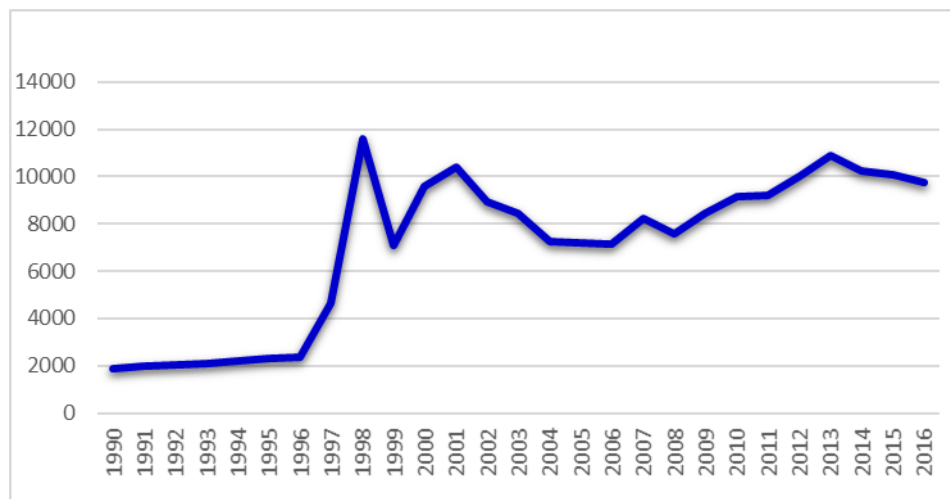
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, No. 1, Desember 2009

Gambar 1.2

Pergerakan DPK dan Kredit Pada Bank Konvensional

Pada gambar 1.2 menggambarkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) pada bank konvensional pada tahun 2008 tidak mampu lagi memenuhi kredit yang diminta. Dimana DPK tahun 2007 pada bank konvensional sebesar Rp 1.310,2 miliar mengalami penurunan menjadi Rp 1025,6 miliar pada tahun 2008. Sedangkan pada indikator kredit mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar Rp 862,4 miliar menjadi Rp 935,1 pada tahun 2008. Dari kondisi yang tidak seimbang tersebut memicu rendahnya likuiditas yang berdampak pada rentannya perbankan terhadap krisis.

Selain dari faktor internal, masih lemahnya sistem pengawasan dan pengaturan bank yang berakhir pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, krisis juga berasal dari faktor eksternal. Pada gambar 1.3 dibawah ini dapat dijelaskan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami penurunan yang sebelumnya pada akhir tahun 1997 hanya bergerak pada kisaran Rp. 4,650 per dolar AS merosot mencapai Rp. 11,590 per dolar AS pada tahun 1998.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017(diolah)

Gambar 1.3
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Tahun 1990-2016

Kondisi ekonomi mengalami ketidakpastian yang terus meningkat sehingga mengguncang pasar uang, pasar valas dan pasar modal Indonesia serta menambah beban hutang Indonesia khususnya pihak swasta yang berpotensi menyebabkan *capital outflow* yang besar. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dari adanya peristiwa tersebut mengakibatkan masyarakat menarik tabungan yang ada di bank secara besar-besaran (*Bank Runs*). Sementara itu kredit yang disalurkan oleh

bank sebagian besar terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan besar yang rentan terhadap dampak krisis keuangan tersebut. Kredit macet (*Non Performing Loan*) mencapai 30% sehingga bank kesulitan untuk mengembalikan uang kepada masyarakat (Sukrudin, 2014).

Sesungguhnya dengan menurunnya nilai rupiah dapat meningkatkan nilai ekspor, namun adanya krisis keuangan mengakibatkan permintaan komoditas dari luar negeri mengalami penurunan. Menurunnya ekspor akan mengurangi pendapatan negara apabila tidak diimbangi dengan pengeluaran Dollar melalui penurunan impor maka menyebabkan defisit perdagangan. Adanya defisit perdagangan akan berpengaruh pada modal yang akan masuk seiring dengan turunnya likuiditas pada pasar keuangan global. Selain itu, dengan naiknya impor disaat ekspor mengalami stagna akan menekan kenaikan cadang devisa sehingga akan menimbulkan ekspektasi gejolak depresi nilai rupiah. Sehingga akan mengacaukan produksi dalam negeri yang akan berdampak buruk pada pengurangan pekerja atau meningkatnya pengangguran (Sudarsono, 2009).

Melihat pentingnya peran strategis dari sistem keuangan terhadap perekonomian, maka perlu pengkajian berbagai *tools* untuk memantau kondisi stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan membuat indeks stabilitas sistem keuangan, dengan tujuan memonitor dan mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian suatu negara. Sebelumnya Bank Indonesia memiliki indeks untuk mengukur kinerja sistem keuangan,

yaitu dengan menggunakan, *Financial Soundness Index* (FSI). Selain FSI yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, *Danareksa Reseach Institute* (DRI) juga mengembangkan suatu indeks yaitu *Coincident Economic Index* yang digunakan untuk mengetahui kondisi perbankan di Indonesia yang kondisinya terus berfluktuatif sehingga naik turunnya kondisi perbankan tentu membuat kondisi sistem keuangan akan ikut berfluktuatif membentuk siklus keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Levine dan Zervos, 1998; Demirguc-Kunt dan Maksimovic, 1999 dalam Gunadi dkk, 2013) menyimpulkan bahwa pasar yang telah berkembang mampu meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara. Pasar modal dapat menjalankan dua fungsi secara sekaligus, meliputi fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (Husnan, 1993 dalam Gunadi dkk, 2013), sehingga pasar modal mempunyai peran yang besar dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal mempunyai fungsi ekonomi, dikarenakan pasar tersebut mampu menyediakan fasilitas yang dapat mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (*issuer*).

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), seperti yang dilakukan oleh Sukrudin (2014) dengan judul Analisis Stabilitas Sistem Keuangan. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pergerakan indeks menunjukkan bahwa secara umum stabilitas sistem keuangan Indonesia berada pada koridor *financial instability* atau kondisi tidak stabil. Pertumbuhan volume

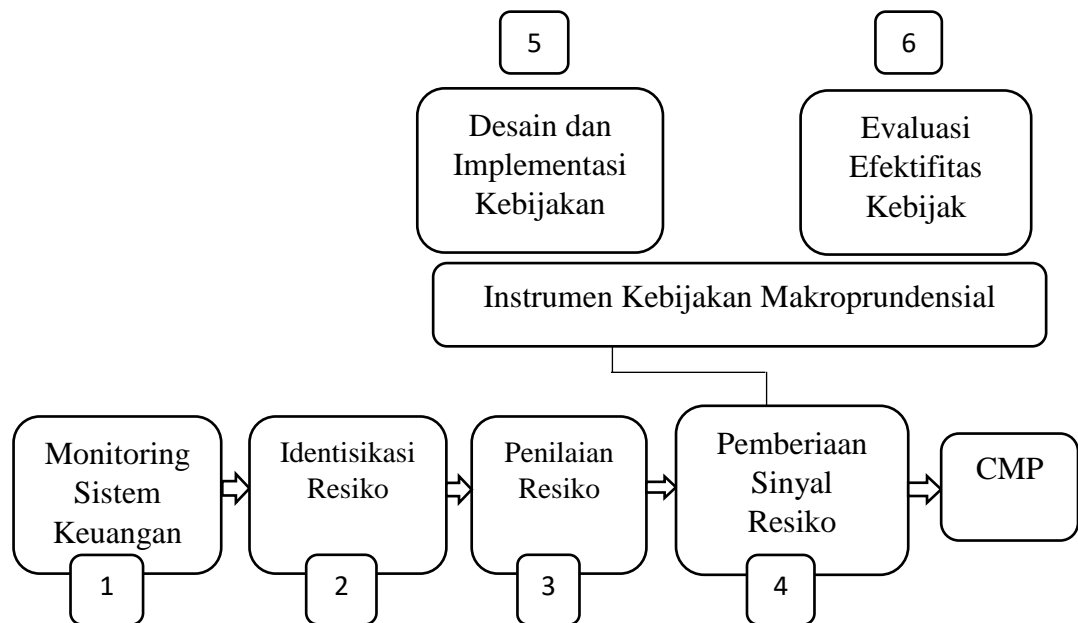
GDP dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berkontribusi positif dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik menulis penelitian lebih lanjut namun berbeda objek dan waktunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Di latar belakang inilah penulis mengangkat judul **“ANALISIS PENGGUNAAN INDEKS STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan batasan pada Analisis Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebagai berikut :

Bank Indonesia membuat Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dari sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan Indonesia terdiri dari dua dimensi yaitu pasar keuangan dan institusi keuangan. Seperti pada gambar 1.4, secara umum kerangka kebijakan makroprudensial dibawah memiliki tujuan untuk mengidentifikasi resiko pada sistem keuangan serta kapan saat yang tepat bagi otoritas keuangan untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu mencegah penyebaran resiko bagi sistem keuangan yang berpotensi mengakibatkan resiko sistemik (Bank Indonesia, 2014). ISSK yang dibangun nantinya akan digunakan pada tahap pertama, yaitu pada monitoring sistem keuangan.



Sumber : Kajian Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia tahun 2014

Gambar 1.4

Alur Kerangka Kebijakan Makroprudensial

C. Rumusan Masalah

Dari adanya krisis, Indonesia menjadi lebih memperhatikan dan menjaga stabilitas makro ekonomi khususnya kebijakan moneter dan berhati-hati terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh perekonomian global. Dengan adanya krisis tersebut, Indonesia melalui Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan yang stabil akan memiliki dampak langsung pada kesehatan dunia perbankan, dengan sistem keuangan yang stabil dunia perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara maksimal, tentu hal ini juga akan mempengaruhi sektor riil.

Dengan melihat adanya peran strategis sistem keuangan dalam suatu perekonomian, perlu dilakukan pengkajian berbagai tools untuk pemantauan dan penilaian stabilitas sistem keuangan. Salah satunya dengan pembuatan indeks stabilitas sistem keuangan, yaitu suatu indikator untuk memperhatikan perkembangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang akan memberikan pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan suatu perekonomian. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai dasar untuk mengkaji beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana mengukur Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk mengukur Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi pembuat kebijakan di Indonesia, dengan cara mengetahui indikator apa saja yang memberikan tekanan terhadap indeks Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Indonesia.

2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hal stabilitas sistem keuangan Indonesia
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

